

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maluku Utara merupakan provinsi bagian Timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999 yang sebelumnya menjadi kabupaten dari provinsi Maluku bersama dengan Halmahera Tengah, berdasarkan UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor Tahun 2003. Jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 1.316.973 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa/km². Maluku Utara, memiliki 1.407 pulau dengan luas mencapai 140.255 km² dengan 76% wilayahnya merupakan lautan. Seluas 33.278 km² berupa daratan dan memiliki Kawasan hutan seluas 3.1 juta hektar, yang menjadi sumber kehidupan warga, sekaligus jadi sasaran eksploitasi banyak pihak.

Ibu kota Provinsi Maluku Utara saat ini berada di kota Sofifi, sehingga menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan dengan fokus pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan yang dibutuhkan dari sebuah ibu kota. Kota Sofifi berada di poros pulau Halmahera, yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Sehingga Sofifi menjadi akses penghubung antara kabupaten atau kota, baik melalui transportasi darat ataupun laut.

Saat ini Sofifi masih menjadi bagian dari wilayah administrasi kota Tidore Kepulauan. Dengan Jumlah Penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 2.576 jiwa dengan kepadatan 1.051 jiwa/km². Kepadatan Penduduk dari tahun ke tahun, menimbulkan kebutuhan akan pemukiman dan pusat-pusat kegiatan meningkat, Sehingga memerlukan fasilitas pelayanan di bidang pemadam kebakaran.

Pelayanan terhadap pemadaman kebakaran dan penyelamatan tidak hanya di butuhkan di daerah pemukiman yang padat penduduk, akan tetapi di kawasan hutan dan perairan juga sangat di butuhkan. Mengingat, luasnya hutan serta mobilitas penduduk yang cenderung melalui transportasi laut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Maluku Utara, tercatat pada tahun 2019 terjadi 20 kasus kebakaran hutan di Maluku Utara. Sementara untuk kebakaran di laut, pada tanggal 29 mei

2021 terjadi peristiwa kebakaran sebuah kapal, di perairan Limafatola, Kecamatan Sanana, kepulauan Sula, Maluku utara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran baik darat, laut dan hutan sangat diperlukan. Selain kesiapsiagaan bencana kebakaran, pendataan mengenai kasus-kasus kebakaran di Maluku Utara juga diperlukan, agar bisa digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap kinerja dari dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah.

Majunya teknologi yang berkembang, memerlukan peningkatan kualitas dari sarana unit pemadam kebakaran berupa sistem dan keterampilan serta kesiapsiagaan dari petugas pemadam kebakaran secara cepat dan tanggap dalam melayani dan menjaga keselamatan manusia dari bencana kebakaran.

Namun hingga saat ini, fasilitas terkait dengan pemadam kebakaran belum terpenuhi, baik sarana dan prasarananya, serta satuan unit kerjanya. Sehingga mengakibatkan, pelayanan serta pendataan mengenai bencana kebakaran tidak terpenuhi secara optimal. padahal keberadaan pemerintah daerah Dalam hal ini Dinas pemadam kebakaran berperan penting yaitu sebagai pelindung masyarakat dari dampak kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah bertanggung jawab dalam usaha perlindungan, baik berupa pencegahan maupun perlawanan terhadap bahaya kebakaran. Pemerintah juga harus menyediakan dan mengusahakan baik peralatan, maupun sistem kerja unit yang mampu melaksanakan tugas ini.

Untuk itu, maka sangat perlu untuk melakukan pendataan terkait kasus pemadam kebakaran di provinsi Maluku Utara serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, atau Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Tipe B) yang baru di Sofifi, mengingat luasnya Provinsi Maluku Utara, maka pelayanan terkait pemadam kebakaran akan di upayakan pada daerah-daerah yang berada di sekitar Sofifi. sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi dan dampak-dampak kebakaran dapat dikurangi dengan cepat dan tanggap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Tipe B) yang Mewadahi Aktivitas kebakaran, baik darat, laut dan hutan?
2. Bagaimana penataan sirkulasi dan tata ruang yang tepat dalam Kantor Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Tipe B), sehingga dapat bekerja secara cepat dan tanggap?

1.3 Tujuan dan Manfaat perancangan

Tujuan Perancangan

1. Untuk menghasilkan desain fisik arsitektur yang mampu mewadahi seluruh aktivitas Pemadam Kebakaran baik darat, laut dan hutan
2. Untuk mendapat pola sirkulasi dan tata ruang yang mampu mendukung kecepatan dari pergerakan petugas.

Manfaat Perancangan

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini penanggulangan kebakaran secara cepat dan tanggap.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik di darat, laut, maupun hutan.

1.4 Ruang Lingkup Perancangan

Ruang lingkup perancangan menitik beratkan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kantor dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah Provinsi Maluku Utara (Tipe B).
2. Sirkulasi yang efektif sesuai dengan pengelompokan aktivitas di dalam Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Tipe B).

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terkait dengan perancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Tipe B) adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang objek, rumusan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, ruang lingkup perancangan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori, menguraikan tentang pengertian objek rancangan, penggunaan literature, dan teori-teori arsitektur secara umum, serta studi komparasi.

BAB III Metode Perancangan, menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam proses penelitian guna menghasilkan objek rancangan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai.

BAB IV Tinjauan Objek Rancangan, menguraikan tentang tinjauan lokasi perancangan dan tinjauan khusus objek perancangan.

BAB V Analisa dan Konsep Perancangan, menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam menganalisis data sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan tujuan perancangan.

BAB VI Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan menguraikan tentang hasil dari keseluruhan penulis, sedangkan saran difokuskan pada pendalaman, pengkajian serta langkah-langkah strategis terkait dengan pengembangan objek rancangan.